



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ADI RAHARJO
- Jabatan** : KEPALA BIDANG
- NHK** : 227879

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.590.000.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/160 m2 di KAB / KOTA SEMARANG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 274 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA SEMARANG , HASIL SENDIRI Rp. 740.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 420.000.000

- MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
- MOBIL, TOYOTA SUV FORTUNER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
- MOTOR, VESPA LX 125 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 6.200.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 117.120.063

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.133.320.063

III. HUTANG Rp. 25.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.108.320.063

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.